

STRATEGI KOMUNIKASI KONTROL JEJARING KEBIJAKAN DALAM GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN (GEBRAK PAKUMIS) DI KABUPATEN TANGERANG

Rizky Ilhami, Nur Ratih Dewi Affandi, Yusuf Hartawan

1. Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pasundan_ administrasi.publik@unpas.ac.id
2. Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pasundan_ ilmu.komunikasi@unpas.ac.id

Abstract

Housing and settlements have a very fundamental role in Indonesian people's life. Considered the problem that often occurs is the level of housing needs that unbalanced with the level of regional capacity in providing habitable housing. As a result, a residential area will receive a load that exceeds the carrying capacity of its environment and tends to become a slum. The problem of settlements is serious because it will cause a fatal pocket of poverty and then cause various social problem beyond the government's ability to handle and monitor it. The Tangerang Regency government tries to clean up uninhabitable houses through the GEBRAK PAKUMIS Program. The main focus of this program is to improve the water and sanitation sector with a focal point in improving the quality of houses because a poor sanitation system is a major factor in the formation of slum areas. This study aims to analyze and find theoretical answers to the principles of policy networks and obtain new concepts about policy networks. This research uses descriptive qualitative methods, data collection techniques using interviews, observation, and documentation. One of the problems that are the basis for the failure of this program is the procedure. Based on the problems faced by residents as recipients of house renovation assistance, environmental development, and community empowerment, the right communication strategy is a solution to communicate the benefits of the program to the beneficiary residents. Therefore, the communication strategy solution offered in this study is as a stimulant for local government to provide populist socialization to residents to bring citizens to ease in taking procedures in this program.

Keyword: Communication strategy, Gebrak Pakumis Slums, Policy Network

I. Pendahuluan

Masyarakat merupakan makhluk sosial, ekonomi dan politik. Sebagai makhluk sosial, pemenuhan atas perumahan dan permukiman menjadi suatu kebutuhan sosial budaya masyarakat. Bragam masalah publik muncul di permukaan, namun tidak semua masalah publik masuk dalam agenda kebijakan, hanya masalah-masalah tertentu yang dianggap penting yang akhirnya masuk dlam agenda (Wardhana, 2019) Perumahan dan permukiman mempunyai

peran yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia mengingat permasalahan yang sering terjadi adalah tingkat kebutuhan rumah tinggal yang tidak seimbang dengan tingkat kemampuan daerah dalam menyediakan permukiman yang layak huni.

Permukiman kumuh selalu menjadi masalah yang terdapat pada kota-kotabesar di Indonesia, Menurut Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, menjelaskan indikator untuk menentukan tingkat kekumuhan dilihat dari 6 kriteria yaitu kondisi bangunan hunian, kondisi aksesibilitas lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi pelayanan air minum baku, kondisi pengelolaan air limbah, dan kondisi pengelolaan persampahan. Suatu kawasan menjadi kumuh karena padatnya bangunan dan ukuran luas bangunan yang berada di bawah standar.

Timbulnya Permukiman Kumuh secara umum dalam suatu kota adalah akibat pergeseran peruntukan penggunaan tanah dan bangunan dalam kota bersangkutan (Reksodiputro, 1990). Karena pertumbuhan ekonomi industri dan perdagangan) yang pesat, maka daerah industri dan perdagangan ini (daerah bisnis) bergerak secara lambat menyerbu daerah permukiman. Penghuni daerah permukiman yang cukup penghasilannya akan pindah ke daerah yang dianggapnya lebih nyaman sebagai permukiman barunya. Mereka yang tidak cukup penghasilannya terpaksa tetap tinggal di daerah semula, bercampur dengan kegiatan bisnis yang secara agresif mengembangkan sayapnya.

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota dan kabupaten untuk menangani dan mengawasinya

Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Kumuh Miskin di

Kabupaten Tangerang (GEBRAK PAKUMIS) adalah Program yang pengertiannya menurut Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2016 adalah Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni berbasis kawasan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan sosial dan atau hibah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berpola hidup bersih dan sehat. Program GEBRAK PAKUMIS ini dicanangkan karena fakta di Kabupaten Tangerang masih banyak kawasan yang padat, kumuh dan miskin yang merupakan salah satu masalah prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang.

Dalam perjalanan pelaksanaan Program GEBRAK PAKUMIS sejak 2011 sampai saat ini, banyak dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Tetapi hasil temuan awal peneliti dari wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung kemudian tinjauan data sekunder yang sudah peneliti olah dapat tergambar pada tabel 1.1 yang diantaranya:

Tabel 1.1
Data Anggaran Target dan Realisasi Program Gebrak Pakumis

Tahun	Anggaran	Target	Realiasi
2017	Rp.14,300,000,000	1.000 Unit	876 Unit
2018	Rp.14,300,000,000	1.000 Unit	890 Unit
2019	Rp. 19,000,000,000	1.044 Unit	916 Unit
Jumlah	Rp. 47,600,000,000	3.044 Unit	2.682 Unit

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 2019

Berdasarkan data anggaran di atas, target dan capaian program GEBRAK PAKUMIS dapat dijelaskan bahwa walaupun program GEBRAK PAKUMIS ini sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah dan lingkungan warga masyarakat Kabupaten Tangerang yang berpenghasilan rendah. Tetapi data tersebut menggambarkan bahwa masih banyak terdapat kendala teknis dan non-teknis yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Permasalahan di lapangan dijelaskan oleh salah satu tim teknis Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman ketika peneliti melakukan observasi awal adalah kinerja tim fasilitator ketika menjadi relawan dan tidak mendapatkan bayaran dalam pelaksanaan program GEBRAK PAKUMIS.

Selain daripada itu tidak terpenuhinya realisasi dari target yang sudah ditentukan. Hal ini menandakan bahwa implementasi dari program tersebut belum sepenuhnya berhasil dan masih menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Serta para masyarkat yang merasakan penjangnya prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan program ini

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan-permasalahan yang peneliti temukan pada obervasi awal, Program GEBRAK PAKUMIS ini belum sepenuhnya menjawab persoalan-persoalan dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mengharapkan hunian yang layak dan kawasan lingkungan yang sehat. Perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi yang dilakukan oleh aktor-aktor terkait agar nantinya warga masyarakat merasakan suatu perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik lagi dalam Program GEBRAK PAKUMIS ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan komunikasi yang menjadi hambatan komunikasi kontrol jejaring kebijakan dalam suksepsi program Gebrak Pakumis dan menggali strategi komunikasi untuk sussesasi program tersebut.

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode analisa deskriptif merupakan penelitian dan analisis terhadap masalah yang sedang terjadi dengan harapan menghasilkan penemuan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pendekatan kualitatif ini dipandang lebih relevan dan cocok karena bertujuan untuk menggali dan memahami apa yang tersembunyi di balik program GEBRAK PAKUMIS yang terjadi saat ini baik di masyarakat, praktisi dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Seperti yang dikatakan Denzin dan Lincoln dalam (Creswell, 1998: 15), bahwa:” Penelitian kualitatif memiliki fokus pada banyak metode, meliputi pendekatan interpretif dan naturasalistik terhadap pokok persoalannya. Ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari segala sesuatu di lingkungannya yang alami, mencoba untuk memahami atau menafsirkan fenomena menurut makna-makna yang diberikan kepada fenomena tersebut oleh orang-orang. Penelitian kualitatif meliputi penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris yang diteliti peneliti kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah kehidupan, wawancara, pengamatan, sejarah, interaksi, dan naskah-naskah visual yang menggambarkan momen-momen problematik dan kehidupan sehari-hari serta makna yang ada di dalam kehidupan individu.”

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik wawancara, dalam hal ini terbagi menjadi dua jenis wawancara yaitu unstructured dan *semistructured interviews*
2. Observasi, Menurut Bungin (2005: 134), “observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati peneliti.

3. Dokumentasi, Selain menggunakan metode wawancara dan observasi (pengamatan) dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi dokumentasi (yang disebut juga metode dokumenter).

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data, Miles dan Huberman (Dalam Suprayogo dan Tobroni, 2001:193), mengemukakan “reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung”.
2. Penyajian Data, Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraiansingkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat dalam bentuk grafik, matrik, network, dan chart (Sugiyono, 2005: 95).
3. Penarikan Kesimpulan, Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2005: 99), adalah “penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya”.

III. Hasil dan Pembahasan

Komunikasi merupakan hal yang sangat krusial dalam segala program yang dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal ini konsep dasar komunikasi yang digagas oleh Harold Lasswell di mana *who says what in what channel and what effect*

atau siapa berkata apa melalui media apa dan memberikan efek bagaimana menjadi landasan dalam menentukan strategi komunikasi seperti apa yang harus digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang untuk mensukseskan program pemerataan pembangunan yakni program Gebrak Pakumis. Hal ini akan menentukan *feedback* dari target komunikasi atau komunikasi atau biasa disebut komunikasi transaksional (Nugraheni & Widyaningrum, 2021). Sejalan dengan nama program yang ditujukan untuk perumahan warga kumuh dan miskin, tentu saja latar belakang sosial dan ekonomi target pemerintah daerah ini merupakan warga yang berpenghasilan rendah.

Hal ini menjadi masalah tersendiri di mana warga berpenghasilan rendah ini tentu saja memiliki cara atau sudut pandang yang berbeda atau butuh penanganan yang khusus. Khususnya dalam membangun komunikasi pada program Gebrak Pakumis itu sendiri. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa masalah yang krusial dan menjadi *barriers* atau hambatan dalam mengkomunikasikan program ini pada target masyarakatnya.

3.1.1 Prosedur yang panjang

Sebagaimana kita ketahui bersama setiap program baik yang di dijalankan oleh pemerintah maupun dijalankan oleh pihak swasta tentu saja memiliki prosedur. Seperti contohnya BPJS atau program asuransi kesehatan yang digagas oleh pemerintah pusat, untuk menggunakannya di Rumah Sakit tidak begitu saja dapat digunakan secara langsung. Namun memerlukan prosedur bertingkat yang harus dilakukan oleh penggunanya, seperti melakukan pemeriksaan dipusatkesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan surat rujukan, kemudian maju ke rumah sakit yang ditunjuk untuk membuat surat rujukan kepada rumah sakit yang dituju. Tetapi panjangnya prosedur ini tidak dianggap rumit, terbukti dengan jalannya program ini

hingga kini, bahkan jumlah nasabah BPJS terus meningkat dalam setiap tahunnya.

Begitu pula program Gebrak Pakumis yang diusung oleh pemerintah daerah Tangerang. Untuk mendapatkan renovasi rumah padat kumuh dan miskin ini pula ada prosedur bertingkat yang harus dilakukan oleh para pemilik rumah yang akan di renovasi. Setelah program ini disosialisasikan pada warga target, warga harus melakukan laporan atau pengisian formulir yang ada pada di kelurahan. Dalam formulir tersebut ada beberapa kolom yang harus diisi oleh warga yang bersangkutan, setelah itu formulir tersebut dikembalikan ke kelurahan. Formulir yang telah masuk ke kelurahan tersebut nantinya akan di laporkan ke tingkat yang lebih tinggi sampai pada tingkat Kabupaten. Di sanalah seleksi dilakukan yang nantinya pada akhirnya ditentukanlah rumah mana yang akan dibedah dan lingkungan mana yang akan dikembangkan juga bagaimana cara mengembangkan masyarakat di sana

Setelah pengisian dan penyerahan formulir, nantinya petugas akan melakukan survey pada rumah dan lingkungan yang menjadi target. Setelah itu, barulah petugas akan melakukan penyeleksian layak atau tidaknya rumah untuk dibedah. Namun tidak lantas langsung dilakukan pembedahan ada beberapa tahap lagi tahapan yang harus dilalui oleh warga, namun kembali dilakukan klarifikasi pencocokan dari formulir yang sudah diisi dan dikembalikan kepada petugas diantaranya syaratnya harus :

1. WNI dan sudah berkeluarga
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan dasar hukum yang syah dan tidak dalam sengketa
3. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah dengan kondisi yang tak layak huni
4. Sebelumnya belum pernah mendapat bantuan pemerintah untuk perumahan
5. Penghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP)
6. Berseia berswadaya dan membentuk KPB

Poin diatas yang melengkapi program Gebrak Pakumis menurut warga menjadi suatu yang menambah ribetnya prosedur dari mulai melaporkan sampai pada akhirnya terpilih menjadi rumah yang dibedah, lingkungan yang dibangun juga masyarakat yang diberdayakan. Karena program ini bukan hanya membangun atau membedah rumah tapi juga membangun lingkungan dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya.

3.1.2 Warga Beralih dan Mengandalkan Program CSR

Prosedur yang lumayan panjang harus dilalui oleh warga pemukiman kumuh dan miskin bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melewatinya secara bertahap dan bertingkat juga persyaratan yang harus mereka isi menjadikan warga menyerah sebelum bertanding. Mereka lebih memilih untuk tidak melalui prosedur-prosedur panjang dan jelimet ini.

Di sisi lain sebagai daerah yang dikelilingi perusahaan-perusahaan swasta, kabupaten Tangerang merupakan lahan yang dibanjiri oleh program-program CSR (Customer Social Responsibility). Perusahaan perusahaan raksasa ini pula mengintip menjadikan program bedah rumah sebagai salah satu program mereka. Prosedur yang harus dilalui warga dalam hal ini jauh lebih singkat dan sederhana dibandingkan dengan program serupa yang digagas pemerintah daerah yakni Program Gebrak Pakumis. Contohnya saja program bedah rumah yang dibuat oleh salah satu stasiun televisi swasta, para target tinggal mengisi formulir nama, usia target, alamat, profesi dan alasan mengapa target layak mendapatkan bantuan dari stasiun televisi swasta tersebut. Survey dan wawancara dari pihak televisi swasta tersebut juga dilakukan guna mengkonfirmasi data yang mereka dapatkan. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan, apa yang harus dijalankan warga untuk mendapatkan CSR dari pihak televisi swasta jauh lebih sederhana dibandingkan prosedur yang harus mereka lakukan pada pemerintah daerah. Hal ini membuat mereka memiliki

preverensi atau lebih memilih program CSR dari perusahaan swasta ketimbang program Paumis yang digagas oleh pemerintah daerah.

3.1.3 Perumahan Warga Yang Dihimpit oleh perumahan elit

Pembangunan yang tidak terlendali alias besar-besaran namun tidak merata menjadikan banyaknya perumahan-perumahan kumuh yang terhimpit oleh perumahan-perumahan elit. Hal ini dikarenakan oleh beberapa diantaranya pembebasan lahan untuk perumahan baru yang tidak menyeluruh dan pihak warga yang tidak mau menjual tanahnya. Kendala ini menjadikan perumahan kumuh dan miskin warga tidak terdeteksi keberadaannya. Pemerintah daerah setempat menganggap daerah itu sudah cukup dan tidak memerlukan bantuan sama sekali.

3.2. Strategi Komunikasi Kontrol Jejaring dengan Pendekatan Stimulan Organism Respon (SOR)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga menjadi *barriers* atau hambatan dalam suksesi program Gebrak Pakumis di Kabupaten Tangerang. Sejalan dengan uraian di atas masalah-masalah tersebut merupakan hal yang sangat mengganggu. Dalam pendekatan ilmu komunikasi, teori dasar yakni teori SOR yang digagas oleh Hovland dapat menjadi teori guna mengungkapkan strategi komunikasi yang tepat bagi program ini.

Dalam hal ini keputusan, dorongan sampai aksi yang dilakukan oleh warga Kabupaten Tangerang sebagai target dari program Gebrak Pakumis tidak bisa semerta-merta tergerakkan tanpa adanya bantuan dan dorongan dari pihak pemerintah Kabupaten Tangerang itu sendiri.

Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi dari pihak warga sebagai penerima bantuan bedah rumah, pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, strategi komunikasi yang benar menjadi solusi guna mengkomunikasikan manfaat

dari program ini pada warga penerima bantuan. Teori SOR dalam hal ini tidak berdiri sendiri namun didampingi oleh *Social Learning Theory* atau Teori Pembelajaran Sosial, di mana Stimulan, *Organism* dan *Response* dilengkapi oleh Supporting Facility atau dukungan Fasilitas dan dorongan dari lingkungan, maka sikap yang diambil komunikas atau individu berlanjut menjadi sebuah tindakan yakni perubahan perilaku.

Masalah pertama yang menjadi salah satu pangkal tidak lancarnya program Gebrak Pakumis adalah prosedur panjang bertingkat dan belibet. Hal ini menjadi *obstacle* yang sangat dihindari oleh warga. Selain pengisian formulir yang berlapis-lapis, warga juga diminta untuk membuat sebuah proposal pengajuan yang ditukukkan pada pemerintah daerah. Hal tersebut tentunya menjadi hal yang ditakuti oleh warga, karena dianggap sesuatu yang sulit untuk diwujudkan.

Solusi strategi komunikasi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah, sebagai Stimulan pemerintah daerah baiknya memberikan sosialisasi yang merakyat pada warga guna membawa warga pada kemudahan dalam pengisian formulir dan membuat proposal. Pemerintah daerah seyogyanya meberikan pendampingan dan *template* pembuatan proposal bagi warga target program sehingga warga sebagai penerima Response dapat meberikan respon yang positif sejalan dengan harapan suksesi Program itu sendiri.

Masalah selanjutnya, di mana pilihan warga jatuh pada program CSR yang digagas oleh perusahaan swasta. Hal ini sebetulnya sangat membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya, namun untuk program yang digagas oleh pemerintah daerah, hal ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri, karena untuk sebuah suksesi dari program pemerintah tentu saja respon positif dari warga daerah menjadi prioritas. Mudah dan sederhananya proses mendapatkan bantuan CSR dari perusahaan swasta menjadikan warga

menjatuhkan pilihannya pada program swasta.

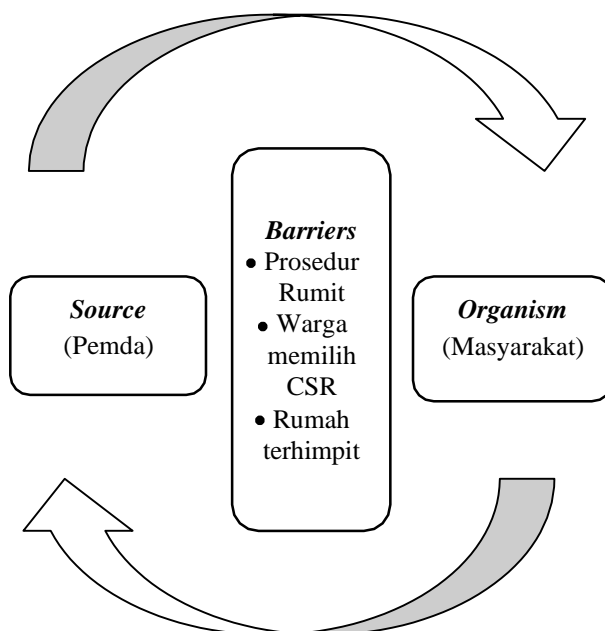
Solusi strategi komunikasi yang ditawarkan dalam hal ini adalah menggandeng perusahaan swasta untuk bekerja sama dengan program Gebrak Pakumis itu sendiri, dalam hal ini, kolaborasi yang apik tentu saja akan membuat program dengan tema yang sama dari pemerintah juga swasta berjalan sinergis dan sempurna. Kekurangan dari masing-masing pihak tentu saja bisa saling menyempurkan.

Pemerintah dan perusahaan swasta sebagai *Source* atau sumber dari pesan yang disampaikan pada masyarakat selaku *Organism* atau penerima pesan akan menghasilkan Response atau umpan balik sejalan dengan harapan pemerintah daerah dan perusahaan swasta.

Solusi strategi komunikasi selanjutnya guna mengatasi miskomunikasi warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan namun karena rumahnya terhimpit perumahan elit adalah dengan koordinasi yang sempurna tiap-tiap aparat tingkatan desa dan tentunya dengan masyarakat itu sendiri. Perumahan kumuh dan miskin yang terhimpit perumahan elit dalam hal ini kerap kali keberadaannya tidak dianggap. Karena rumah-rumah tersebut dianggap tidak ada, dalam hal ini dianggap juga sebagai perumahan elit. Tentu saja dalam hal ini yang menjadi masalah adalah komunikasi yang tidak sinergis antara aparat desa setempat dengan masyarakat

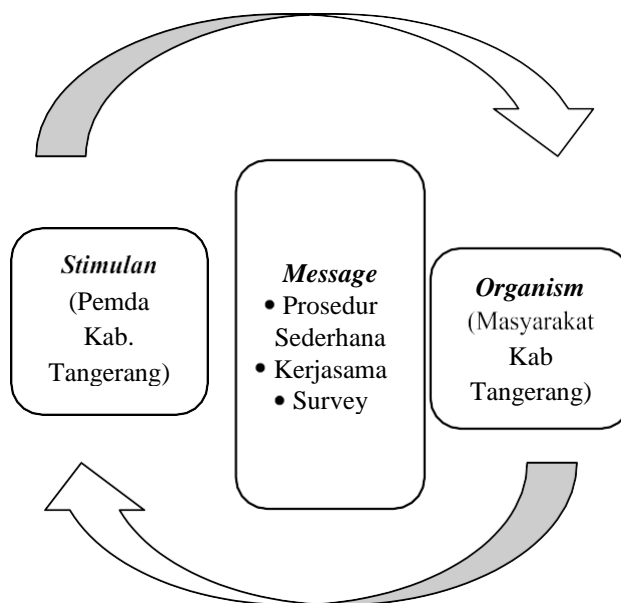
Solusi strategi komunikasi yang ditawarkan adalah dengan menyambung rantai komunikasi yang terputus antara masyarakat dan aparat desa, dalam hal ini aparat desa sungguh harus proaktif dalam mengkomunikasikan program ini juga tahapan-tahapan yang harus dilalui warga agar bisa menjadi bagian dalam suksesinya. Warga juga sebaliknya, mereka tentu saja harus proaktif mencari informasi dan juga memenuhi setiap persyaratan juga tahapan yang harus mereka lalui guna suksesi dan manfaat yang bisa mereka peroleh dari gebrak pakumis itu sendiri. Berikut strategi komunikasi yang ditawarkan dan bisa

menjadi solusi guna suksesi proram Gebrak Pakumis.



Gambar 4.1
Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi di atas dianggap mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam implementasi program gebrak pakumis dengan gambar seperti berikut :



Gambar 4.2
Strategi Komunikasi

4 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh kami pada strategi komunikasi kontrol jejaring kebijakan dalam gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat kumuh dan miskin (gebrak pakumis) di kabupaten tangerang, maka dapat kami simpulkan hasil yang diperoleh dan dianalisis dari para informan yang menerima bantuan dan pengamatan kami di lapangan yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Tangerang membuktikan bahwa kegiatan komunikasi kontrol jejaring kebijakan yang dilakukan dalam menciptakan kepuasan publik dalam menyampaikan informasi dan pesan yang tujuannya untuk masyarakat agar mendapatkan bantuan renovasi namun masih menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yakni prosedur yang panjang, beralihnya warga ke program CSR perusahaan dan perumahan kumuh miskin yang terhimpit perumahan elit.
2. Pemerintah Kabupaten Tangerang hendaknya menggunakan pola komunikasi *Stimulant Organism Response* di mana setiap masalah yang dihadapi warga yang merupakan hambatan dalam komunikasi kontrol jejaring diberikan solusinya. Panjang dan rumitnya pengajuan rumah yang akan direnovasi dibuat sederhana, dibantu pembuatan proposalnya juga dibuatkan tempatnya, perusahaan yang melakukan CSR digandeng oleh Pemda untuk bersama menyukseskan program dan perumahan kumuh miskin yang tidak teridentifikasi karena terhimpit perumahan elit ditelusuri keberadaannya sehingga bisa terdeteksi.

Bibliografi

- Bungin, Burhan (edt), 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oaks California: Sage.
- NUGRAHENI, Yuli;
WIDYANINGRUM, Anastasia
Yuni. JARINGAN KOMUNIKASI
KOPERASI 64 BAHARI
SURABAYA DALAM
PENGELOLAAN HASIL
LAUT. **LINIMASA: JURNAL
ILMU KOMUNIKASI**, [S.l.], v. 4,
n. 1, p. 117 - 138, jan. 2021. ISSN
2614-0381. Available at:
<<https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/3393>>
- WARDHANA, Yuditya. KEBIJAKAN
PUBLIK BERPIHAK KEPADA
SIAPA?. **LINIMASA: JURNAL
ILMU KOMUNIKASI**, [S.l.], v. 2,
n. 1, jan. 2019. ISSN 2614-0381.
Available at:
<<https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/1385>>
- Sugiyono. 2005. "Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung: Alfabeta
- Suprayogo, I dan Tobroni. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya